



**PROGRAM AGROMERINEPOLITAN SUMATERA UTARA:
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir**

Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian pada Fakultas Ekonomi,
diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 5 April 2008

OLEH:

RAMLI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2008



**PROGRAM AGROMERINEPOLITAN SUMATERA UTARA:
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dalam Pembangunan Ekonomi
Wilayah Pesisir**

Pidato Pengukuhan

Jabatan Guru Besar Tetap

dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian pada Fakultas Ekonomi,
diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 5 April 2008

Oleh:

RAMLI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2008**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang terhormat,

- *Bapak Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara*
- *Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara*
- *Para Pembantu Rektor Universitas Sumatera Utara*
- *Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara*
- *Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara*
- *Para Dekan Fakultas/Pembantu Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Sumatera Utara*
- *Para Dosen, Mahasiswa, dan Seluruh Keluarga Besar Universitas Sumatera Utara*
- *Seluruh Teman Sejawat serta para undangan dan hadirin yang saya muliakan*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat sehat wal'afiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka upacara pengukuhan saya sebagai Guru Besar tetap di Universitas Sumatera Utara. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan judul:

“PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH PESISIR”

A. LATAR BELAKANG

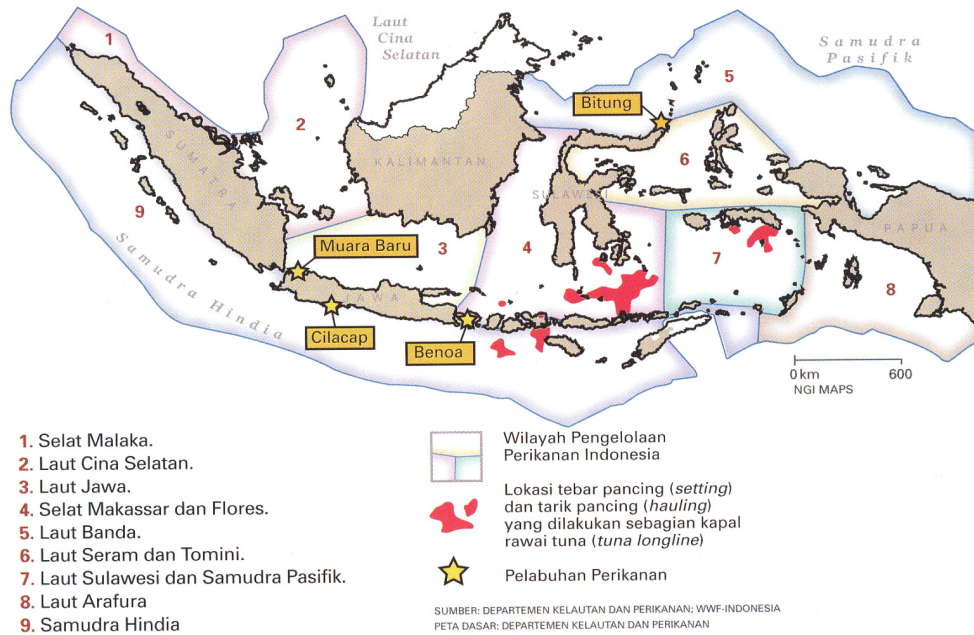
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan topografi mempunyai wilayah Dataran Tinggi Kawasan Bukit Barisan yang umumnya menghasilkan produksi sayur-mayur, dan Wilayah Dataran Rendah Pesisir yang umumnya meng

menghasilkan produksi ikan. Produksi kedua wilayah ini sebagai pusat pemasok kebutuhan perkotaan, tetapi sebagian penduduk di wilayah ini masih dibelenggu oleh lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal dan sebagian wilayahnya menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Fenomena kesenjangan ekonomi di wilayah Dataran Tinggi dan Dataran Rendah Sumatera Utara menjadi isu pokok dan tantangan bagi pembangunan ekonomi Sumatera Utara. Strategi pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Utara ke depan, dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pemerataan pembangunan di wilayah Dataran Tinggi Bukit Barisan dan wilayah Dataran Rendah Pesisir pantai Timur dan Barat melalui pendekatan Wilayah dengan program:

1. Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan (Nota kesepakatan pemerintah daerah tanggal 28 September 2002 yang dituangkan dalam peraturan Gubernur No 050/286k, tanggal 26 April 2005). Tentang Pembentukan Badan Koordinasi dan Tim Teknis Program Pembangunan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara.
2. Agromerinepolitan daerah pesisir (Mulai diprogramkan tahun 2007, berdasarkan SK BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara No: 521/669B/BPSV/II/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dan Agromerine Dataran Rendah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluas Sumatera Utara).

Wilayah pesisir pantai Barat dan pantai Timur Sumatera Utara memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar baik berbagai jenis flora dan fauna laut, serta potensi keindahan alam yang merupakan sumber ekonomi dan modal dasar dalam mensejahterakan masyarakat belum dapat diharapkan secara penuh. Potensi kekayaan alam yang berlimpah belum dapat diandalkan sebagai pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain terjadi paradok wilayah yang kaya dengan sumberdaya alam yang relatif belum dapat mensejahterakan masyarakat pesisir terutama nelayan.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

Sumber: Majalah National Geographic (2006)

Karakteristik wilayah pesisir Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Gambaran karakteristik wilayah pesisir Indonesia dengan Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1.
Karakteristik Wilayah Pesisir Indonesia dan Sumatera Utara

INDONESIA	SUMATERA UTARA
60% penduduk bermukim di wilayah pesisir	Sebagian (53%*) penduduk bermukim di wilayah pesisir
Terdiri dari 17.528 pulau	Terdiri dari 317 pulau
Luas teritorial darat dan laut 7,7 KM ²	Luas teritorial darat dan laut 181.680 Km ²
75% luas wilayahnya adalah darat, laut dan pantai	60,5% luas wilayahnya adalah perairan laut, pantai dan pesisir
Panjang garis pantai 81.000 kilometer	Panjang garis pantai 1.300 kilometer
Sebagian masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan	Sebagian masyarakat pesisir hidup di bawah garis kemiskinan
6,4 juta potensi ikan dan baru 72% dimanfaatkan	Diperkirakan 75% dimanfaatkan potensi ikan yang ada

Sumber: Ramli, 2007

Tujuan program agropolitan dan agromerinepolitan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016 pendapatan petani dan nelayan berada pada level US\$ 3,000 per tahun. Pada kesempatan orasi pidato ilmiah ini, mencoba menyandingkan pemikiran konsep untuk mendukung tujuan program agromerinepolitan Sumatera Utara dengan judul: "Pengolahan Sumber Daya Pesisir dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir".

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut "Bagaimana mendesain model pengolahan sumber daya pesisir dalam pembangunan ekonomi wilayah pesisir pada tahun 2016 pendapatan nelayan perkapita berada pada level US\$ 3,000 per tahun".

C. LANDASAN TEORI

1. Sumber Daya Pesisir

Sumber daya pesisir adalah merupakan integrasi dari semua potensi alam, potensi manusia, potensi buatan dan potensi kelembagaan. Menurut Adisasmita (2006) sumber daya merupakan semua potensi yang disediakan oleh alam dan manusia, baik dalam bentuk tanah, bahan mentah, modal, tenaga kerja, keahlian, keindahan alam maupun sosial budaya. Pengelolaan sumber daya pesisir dalam menghasilkan barang untuk kebutuhan pangan, peralatan, dan hiasan belum optimal. Para nelayan masih melakukan usaha *ekstratif* yang diperoleh dari generasi sebelumnya dengan fokus penangkapan, dan pada usaha *generatif*, masih keterbatasan manajemen dalam usaha, yang membuat mereka tetap dalam belenggu kemiskinan. Sumber daya alam ikan dan hutan bakau bersifat *replenishable resource* (sumber daya yang selalu ada dan muncul secara alami) dan *renewable* yang berlimpah, kekayaan sumber daya alam belum dimanfaatkan untuk komoditi apa yang harus diproduksi. Sumber daya perikanan meskipun dapat pulih, perlu dikelola dengan prinsip dan kaidah yang benar agar tidak mengalami deplasi degradasi dan kepunahan (Nikijuluwu, 2006).

Ilmu Ekonomi bertalian dengan studi tentang bagaimana masyarakat menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa. Sehubungan dengan ini dipergunakan sumber daya yang terbatas atau langka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak terbatas (Reksoehadi Prodja S., 1988).

Teori ekonomi sebagai landasan pengambilan keputusan, apa yang harus di produksi, bagaimana caranya, dan bagaimana distribusinya, belum dilakukan secara optimal atas sumber daya pesisir dan laut yang berlimpah. Pemberdayaan masyarakat pesisir terhadap pengolahan sumber daya pesisir dan laut yang berlimpah adalah bagian yang tak terlepas dari pembangunan desa. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat bertujuan membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri dengan berbasis pada pengembangan potensi alam dan lingkungan (Dahuri, et al, 2004).

2. Paradigma Pembangunan Wilayah

Ilmu pembangunan wilayah merupakan integrasi berbagai teori dan ilmu terapan yaitu, geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu lingkungan, dan sebagainya (Budiharsono, 2005).

Menurut Misra yang disetir Budiharsono (2005), ilmu pembangunan wilayah merupakan disiplin ilmu yang ditopangi oleh empat pilar yaitu geografi, ekonomi, perencanaan kota, dan teori lokasi. Menurut Budiharsono (2005) pembangunan wilayah pesisir dan lautan dengan menggunakan pendekatan pembangunan wilayah terpadu sekurang-kurangnya memperhatikan enam aspek, yang merupakan pilar-pilar pembangunan wilayah, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2: Pilar Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu

Sumber: Budiharsono (2005)

Aspek biogiofisik meliputi kandungan sumber daya hayati, sumber daya non hayati, jasa-jasa kelautan maupun sarana dan prasarana yang ada di wilayah pesisir dan lautan. Aspek ekonomi meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan. Aspek sosial budaya politik dan hankam meliputi kependudukan, kualitas sumber daya manusia, posisi tawar (dalam bidang politik) budaya masyarakat pesisir dan lautan serta

pertahanan dan keamanan. Aspek lokasi meliputi ruang (spasial) yang berkaitan dengan tempat komoditi kelautan diproduksi, dan bagaimana memperoleh sarana produksi, diolah, dan dipasarkan. Aspek lokasi juga menunjukkan keterikatan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya yang berhubungan dengan aspek sarana produksi, produksi, pengolahan maupun pemasaran. Aspek lingkungan meliputi kajian mengenai bagaimana proses mengambil input dari ekosistem, dapat menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kelestarian lingkungan. Aspek kelembagaan meliputi kelembagaan masyarakat yang ada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, dapat juga serangkaian peraturan pusat maupun peraturan daerah dan lembaga-lembaga sosial ekonomi di wilayah pesisir dan laut. Apakah dapat memberikan respon yang positif terhadap pembangunan ekonomi wilayah pesisir dan laut.

Wilayah Sumatera Utara secara topografi dapat dibagi menjadi wilayah dataran tinggi Bukit Barisan dan wilayah Dataran Rendah Pesisir Pantai Timur dan Barat sebagai sentra produksi dan pemasok terutama pada:

- 1) Penyediaan bahan pangan, sayur-mayur, dan ikan untuk kebutuhan penduduk daerah maupun penduduk daerah perkotaan.
- 2) Penyediaan faktor produksi untuk keperluan industri.
- 3) Penghasilan komoditi perekonomian perikanan untuk ekspor.

3. Program Agropolitan Sumatera Utara

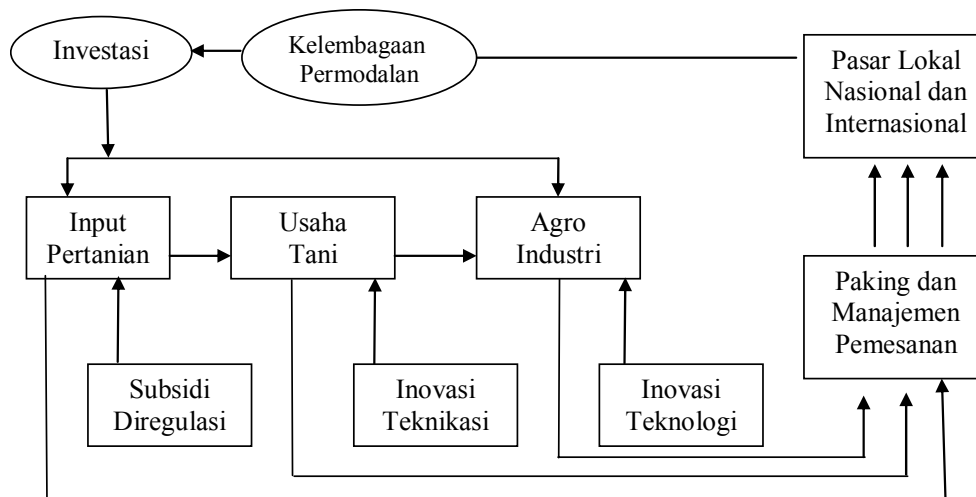
Melihat kondisi sosial ekonomi yang tertinggal dari kawasan lainnya, maka diperlukan suatu strategi pengembangan pertanian yang berbasis komoditi andalan yang mempunyai daya saing tinggi dengan produk pertanian dari luar negeri melalui program agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan yang berpusat di Merek kabupaten Karo. Sebagai payung hukum dari program agropolitan dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara. Ditandai dengan.

- 1) Nota Kesepakatan 5. Pemerintah Daerah (Bupati) tanggal 28 September 2002
- 2) SK. Gubsu No.050/1467 K. 3 Desember 2002
- 3) Kesepakatan bersama 8 Sekda Kabupaten di kawasan Bukit Barisan Sumatera Utara Tanggal 11 April 2005
- 4) Peraturan Gubsu No 050/286 K. Tentang pembentukan badan koordinasi dan tim teknis program pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi bukit barisan Sumatera Utara Tanggal 26 April 2005.
- 5) Keputusan kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara No: 521/669B/BPSUII/2007. Tentang pembentukan kelompok kerja program pengembangan kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan dan Agropolitan Pesisir pulau-pulau kecil dan pulau terluas Sumatera Utara.

Tujuan utama agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara pada Tahun 2016 mencapai brevet US\$ 3,000 dengan cara yang harus ditempuh (dok. KADTBBSU No.3. 8 September 2006):

- 1) Peningkatan produktivitas
- 2) Peningkatan areal luas yang diusahakan petani
- 3) Deversifikasi usaha yang komplimenter atau sinergis
- 4) Peningkatan usaha pengelolaan (diversifikasi vertikal)
- 5) Penurunan biaya
- 6) Peningkatan atau penciptaan bagian pendapatan/keuntungan yang dapat diperoleh petani dan kegiatan *off farm* (pengelolaan dan pemasaran) melalui koperasi dan kemitraan.

Faktor yang dapat menunjang kegiatan agrosila di pedesaan: Masyrofi (1996) yang dikutip Hanori dkk (2003), kelembagaan teknologi, kelembagaan informasi, kelembagaan permodalan dan kelembagaan jasa yang diekspresi pada gambar berikut:



Gambar 3: Berbagai Alam Asistensi dari Sebuah Agroindustri

4. Program Agromerinepolitan Sumatera Utara

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatasi dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksana sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, telah dilaksanakan Tanggal 1 Januari 2001. Kewenangan daerah di wilayah perairan laut meliputi (pasal 10 ayat 2 UU.32/ 2004).

- a. Eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan laut sebatas wilayah laut (sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai perairan laut)
- b. Pengaturan kepentingan administratif
- c. Pengaturan tata ruang

- d. Penegakan hukum terhadap pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah atau dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah (pusat)
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kelautan negara.

Pengelolaan sumber daya perairan laut dengan paradigma baru dalam sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, mempunyai makna (Adisasmita R; 2006):

- 1) Pengelolaan berorientasi pada mekanisme pasar (*dimand and market driven*)
- 2) Pengelolaan berbasis sumber daya dan masyarakat (*Resource and Commonity based Development*)
- 3) Pengelolaan tidak harus seragam tetapi harus sesuai kepentingan dan budaya masyarakat lokal.
- 4) Pengelolaan secara berkeadilan (harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan seluruh masyarakat).

Pendekatan pada paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya perairan laut harus:

- 1) Pendekatan komprehensif (holistik), Multisektoral dan terpadu
- 2) Pendekatan skema spesial
- 3) Pendekatan Partisipatif
- 4) Pendekatan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Membangun ekonomi masyarakat pesisir memiliki derajat komplikasi yang kebebasan dibandingkan kawasan dataran Tinggi Bukit Barisan diperlukan. Hal ini kawasan pesisir dan laut memiliki karakteristik sumber daya perekonomian yang unik (Agustedi; 2001).

- 1) Sumber daya ikan umumnya tidak kelihatan (*Genenally Invisible*)
- 2) Sumber daya ikan merupakan milik bersama (*Cammon Property*)
- 3) Usaha yang memiliki risiko yang sangat tinggi (*Considerable Rish*)
- 4) Produknya sangat mudah busuk (*Highly Perishable*)
- 5) Sumber daya ikan tidak tetap (*Dinamic*)

Karakteristik sumber daya perikanan yang berbeda membuat perbedaan pandangan, sikap, dan tindakan masyarakat, yang perlu diterjemahkan pembangunan ekonomi kawasan pesisir menurut Nikijulw (2006). Banyak kegiatan pembangunan ekonomi kawasan pesisir yang berlangsung tanpa perencanaan dan pemahaman yang baik dan benar mengenai sumber daya alam dan manusia di kawasan pesisir, akibatnya banyak masalah sosial ekonomi lingkungan yang muncul di kawasan pesisir yang akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten di Sumatera Utara yang mempunyai 13 daerah pesisir dan menghasilkan ikan tangkapan hasil laut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

No	Kab./Kota	Tahun					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Nias	15.259	15.871.4	16.383.6	16.760.3	5.717.3	6.088.9
2	M. Natal	13.925	13.963.7	13.963.6	14.245.0	14.529.9	15.600.9
3	Tap. Selatan	6.075	378.3	456.0	483.4	495.0	530.2
4	Tap. Tengah	20.704	21.876.5	22.048.1	23.405.5	27.204.1	28.972.4
5	Labuhan Batu	28.867	30.270.2	29.941.9	29.150.9	23.320.0	24.898.8
6	Asahan	72.879	72.879.0	66.400.6	65.540.4	55.092.8	58.673.8
7	Deli Serdang	35.403	35.966.6	37.225.5	41.693.1	15.266.0	17.883.5
8	Langkat	17.818	18.530.7	19.574.0	19.380.4	19.630.9	20.908.7
9	Nias Selatan	0	0	0	0	10.971.0	11.684.1
10	S. Bedagai	0	0	0	0	22.406.1	23.863.3
11	Sibolga	42.082	41.915.4	42.025.4	30.960.0	31.207.7	33.305.0
12	Tanjung Balai	29.604	34.215.0	36.125.0	37.570.0	30.424.8	32.402.4
13	Medan	55.562	55.458.8	61.538.0	62.513.0	66.528.9	70.656.36
	Jumlah	338.215.0	342.325.6	345.681.7	341.702.0	322.484.5	345.468.6

Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2006

Menurut Fauzi Adam Anna. S (2005) Sumber daya perairan menyediakan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi baik langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan manusia, jika pemanfaatan yang berlebihan dapat mengakibatkan timbulnya degradasi pada sumber daya perairan, untuk itu pengenalan terhadap metode optimasi ekonomi sumber daya selama langsung maupun tidak langsung oleh mereka yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya tersebut.

Agromerinepolitan Sumatera Utara diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagai pemberdayaan industri desa pesisir pantai. Dampak positif dari agrosila yang tumbuh dan berkembang di daerah pesisir pantai adalah memberikan kesempatan pada penduduk desa untuk memperoleh penghasilan yang beragam sesuai dengan keterampilan masing-masing. Peran pemerintah melalui kewenangannya dan menggunakan kelembagaannya dapat memfasilitasi suatu kondisi yang kondusif dalam kegiatan program agropolitan dan agromerinepolitan.

Terobosan program agromerinepolitan Provinsi Sumatera Utara baru memfokuskan program pada awal tahun 2007, belum sedetail apa yang telah dilakukan pada program Agropolitan kawasan Dataran tinggi Bukit Barisan. Rancangan Program Agropolitan menjadi sumber untuk memodifikasi pada kegiatan program Agromerine dan tentunya mempunyai perbedaan dalam aspek teknis. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik sumber daya perikanan.

Program agromerineopolitan adalah strategi pengembangan ekonomi kawasan pesisir/pantai dengan tujuan membangun sebuah kota pesisir/pantai yang dapat mendorong kegiatan usaha hilir dan hulu di kawasan pesisir melalui suatu pelayanan kebijakan publik. Tujuan program Agromerineopolitan sama dengan tujuan Agropolitan pada tahun 2016, diharapkan pendapatan nelayan perkapita berada pada breved US\$ 3,000 per tahun.

5. Agroindustri Hasil Laut (Agrosila) sebagai Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi dataran rendah pesisir pantai yang berbasis sumber daya alam pesisir dan lautan diperlukan suatu kebijakan dengan paradigma baru (pendekatan holistik, spesial, parsitipatif, dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, melalui Agroindustri hasil laut).

Menurut Austin (1992), kegiatan Agroindustri ada 4 level:

- 1) Level 1, aktivitas proses berupa pembersihan, pengerasan dan penyimpanan.
- 2) Level 2, aktivitas proses berupa pemisahan, pengeringan, pemotongan dan pencampuran.
- 3) Level 3, aktivitas proses berupa perebusan, pengalengan, pembekuan, ekstraksi, dan pasteurisasi.
- 4) Level 4, aktivitas proses berupa perubahan kandungan kimia dan teksturisasi.

Agrosila sebagai pembangunan suatu wilayah dapat dipertimbangkan karena:

- 1) Produk hasil penekan memerlukan pengelolaan sampai tingkat tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitasnya dan nilai tambahannya (*value added*).
- 2) Menciptakan *backward linkage* subsistem agrosila hulu dan *forward linkage* subsistem agrosila hilir.
- 3) Menciptakan kesempatan kerja dan devisa negara.
- 4) Meningkatkan ekspor dan mengurangi import komoditi pengelolaan hasil laut.
- 5) Pemasok kebutuhan gizi masyarakat dan kebutuhan pangan nominal.

Walaupun program Agrosila sudah berkembang diberbagai wilayah kabupaten namun masih didominasi dengan kegiatan:

- 1) Pengelolaan produk tradisional yang mengutamakan bahan dari hasil tangkapan nelayan (direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, 74,03% produksi hasil laut diolah secara tradisional).

- 2) Pengelolaan hasil perikanan masih didominasi oleh jenis pengelolaan produk-produk tradisional seperti penggaraman, pengeringan, dan pendinginan.

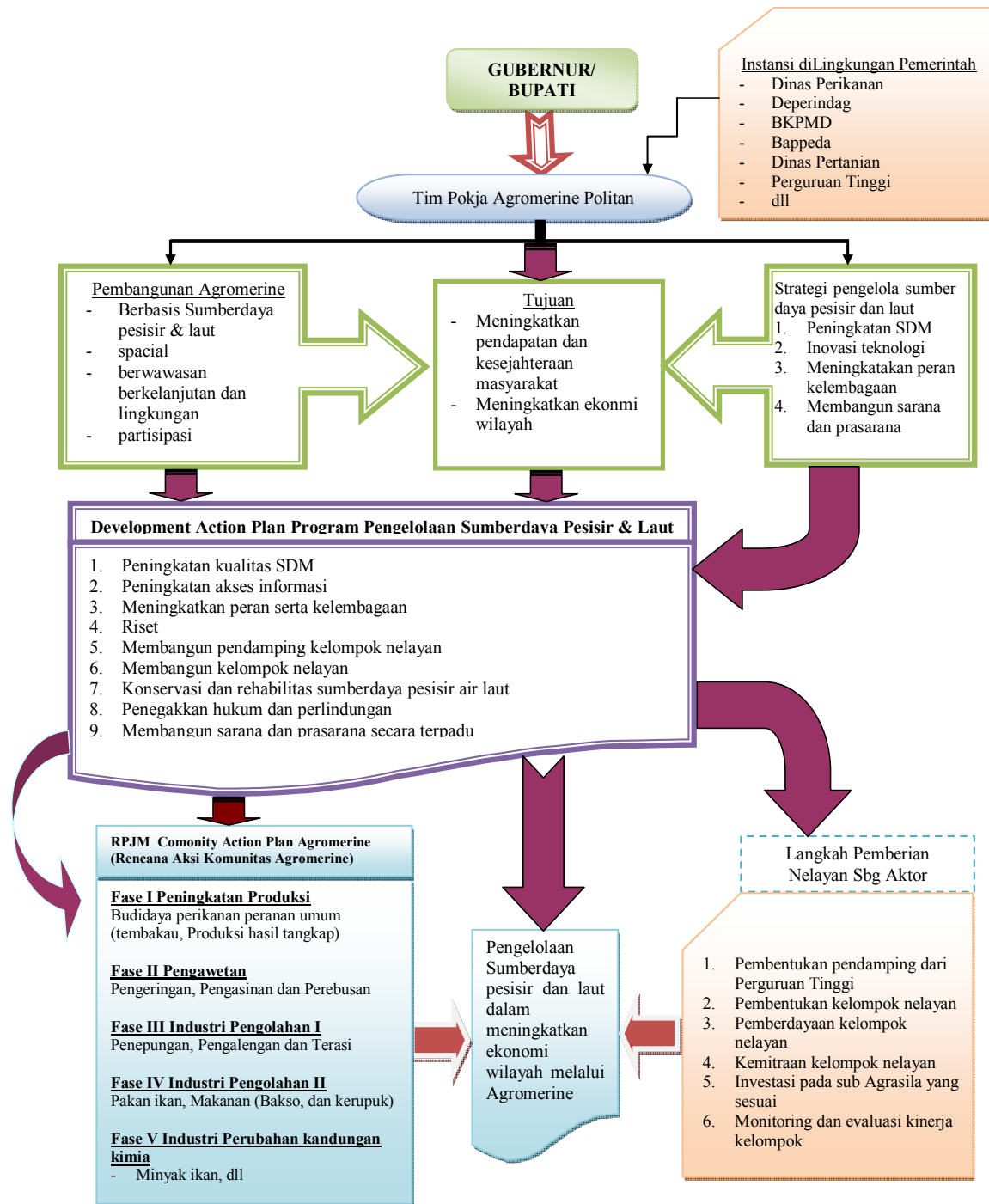
Usaha agrosila perlu ditindaklanjuti dengan suatu strategi yang berbasis pada kelompok nelayan yang dapat meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan atau hasil budidaya yang dapat diproses secara berkelompok atau keluarga nelayan. Dengan peningkatan nilai tambah akan memberikan kontribusi peningkatan pendapatan keluarga nelayan.

D. MODEL PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan alur pemikiran yang dapat diekspresikan pada model pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, alur pikir pada model pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dimulai dari:

- 1) Gubernur/Bupati membentuk Tim Kelompok Kerja Agromerinepolitan.
- 2) Tim Pokja program Agromerine terdiri dari Dinas Perikanan, Depperindag, BKPM, Bappeda, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, Tarukim.
- 3) Tim Pokja menetapkan pendekatan, tujuan, strategi pengelolaan Sumber Daya Pesisir.
- 4) Tim Pokja menetapkan *development action plan*, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- 5) Tim Pokja menjabarkan *developmant action plan*, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Rencana aksi komunitas (*community action plan*) pada rencana pengembangan jangka menengah dari kegiatan agromerine.
- 6) Tim pokja menetapkan pembinaan nelayan sebagai aktor agrosila.

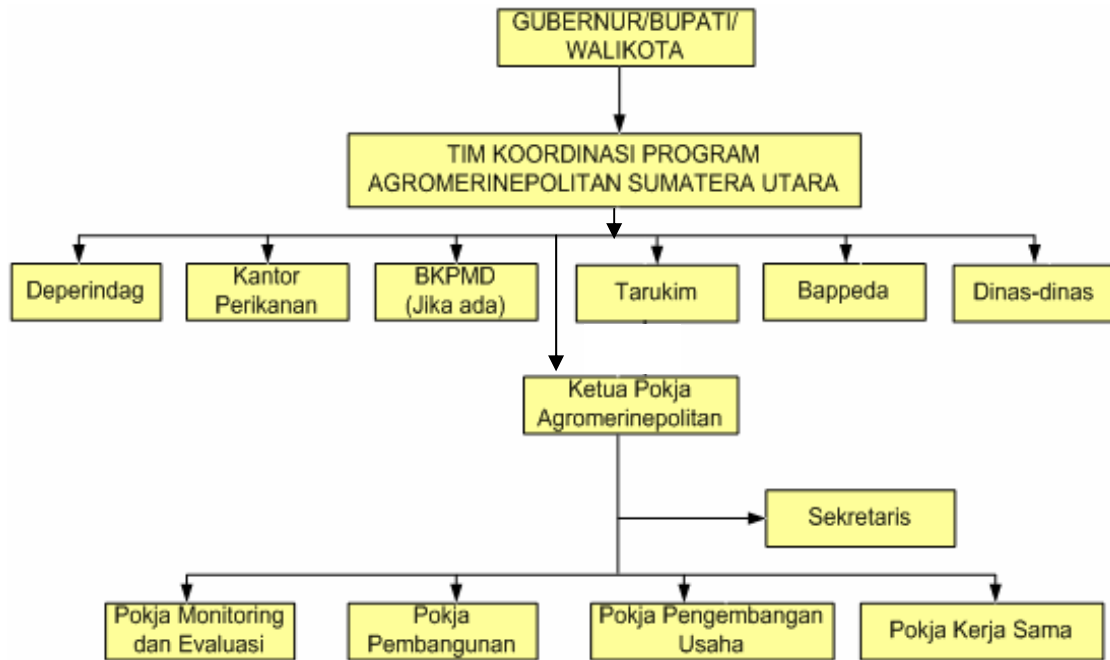
Kondisi alur pikir ini dapat dituangkan pada Gambar 4 sebagai berikut ini:



Gambar 4: Kerangka Konseptual Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut dalam Konteks Agropolitan Sumatera Utara

Berdasarkan model pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, ada dua aktor pelaku Agromerine Sumatera Utara; pertama gubernur/bupati dan Tim Pokja yang struktur organisasi perlu didesain, dan kedua adalah masyarakat (nelayan) yang perlu diberdayakan:

1. Struktur Organisasi dan Tugas Bidang



Gambar 5. Struktur Organisasi Tim Koordinator Pengelolaan Agromerinepolitan

Tata kerja struktur organisasi tim koordinasi pembangunan Agromerinepolitan adalah:

- 1) Bupati berdasarkan tugas dan fungsinya berwenang dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan Agromerinepolitan.
- 2) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan kawasan Agromerine, bupati membawahi dan mengkoordinasikan dengan beberapa lembaga/instansi teknis yang terkait dalam pembangunan Agromerinepolitan.
- 3) Lembaga atau instansi terkait tersebut melakukan hubungan kerja, konsultasi, dan koordinasi untuk kegiatan pembangunan Agromerinepolitan.
- 4) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya dan mewujudkan pelaksanaan tim koordinasi pengembangan Agromerine, maka dibentuk kelompok kerja, yang terdiri dari ketua dan sekretariat serta ada kelompok kerja monitoring dan evaluasi,

kelompok kerja pembangunan, kelompok kerja pengembangan usaha, dan kelompok kerja sama.

- 5) Kelompok kerja tersebut sebagai pelaksana tim koordinasi yang bertanggung jawab kepada bupati.

Sedangkan tugas dari ketua, sekretariat dan masing-masing kelompok kerja (pokja) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati, dan mempunyai tugas memimpin Tim Koordinasi Pengembangan Agromerinepolitan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua.

Tugas-tugas dari sekretaris adalah:

- 1) Mengkoordinasi, mensinkronisasikan, dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Tim Koordinasi Pembangunan Agromerinepolitan.
- 2) Membina dan melayani administrasi ketatausahaan organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Tim Koordinasi Pembangunan Agromerinepolitan.
- 3) Mengkoordinasikan dalam menyusun laporan Tim Koordinasi Pembangunan Agromerinepolitan.

3. Kelompok Kerja Perizinan mempunyai tugas antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah yang berhubungan dengan penyelesaian perizinan yang berkaitan dengan Pembangunan Agromerinepolitan.
- 2) Melakukan pelayanan perizinan secara cepat, tepat dan efisien

4. Kelompok Kerja Pembangunan mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah yang berhubungan dengan pelaksana pembangunan Agromerinepolitan.
- 2) Melakukan pembinaan pembangunan Agromerinepolitan.
- 3) Melakukan pengembangan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya.

5. Kelompok Kerja Pengembangan Usaha mempunyai tugas antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah yang berhubungan dengan pembinaan pembangunan Agromerinepolitan.
- 2) Melakukan pengendalian (pemantauan, pengawasan, dan penertiban) pembangunan Agromerinepolitan.

6. Kelompok Kerja Sama mempunyai tugas antara lain:

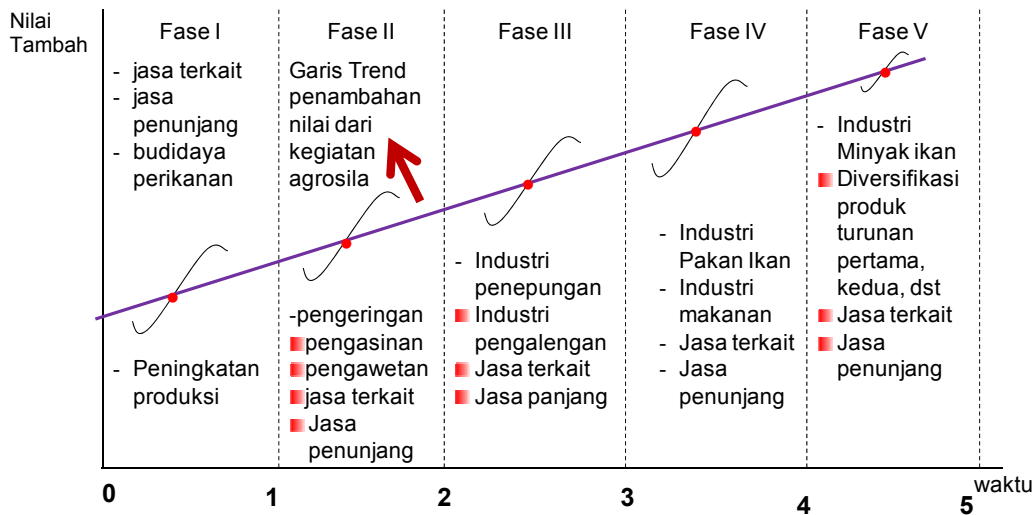
- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah untuk menciptakan hubungan kerja sama antara produksi perikanan satu dengan lainnya atau pengembangan wilayah satu dengan lainnya terutama yang mempunyai keterkaitan pembangunan kawasan Agromerinepolitan.
- 2) Melakukan promosi investasi pembangunan kawasan Agromerinepolitan di dalam maupun di luar daerah pengembangan.
- 3) Mengembangkan sistem informasi kawasan agromerinepolitan.

2. Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan

Langkah pembinaan dan pemberdayaan nelayan untuk menyiapkan satu kelompok yang handal dalam menjalankan aktivitas kegiatan agrosila:

- 1) Menyiapkan bahan penyuluhan penatanan untuk pendamping dan nelayan.
- 2) Menetapkan pendamping dari perguruan tinggi.
- 3) Melaksanakan Trainer of Trainer (TOT) untuk pendamping
- 4) Pembentukan Kelompok Nelayan.
- 5) Pembinaan kelompok oleh pendamping dan instansi terkait.
- 6) Menentukan program aksi kelompok nelayan.
- 7) Merealisisasi program aksi dengan cara kemitraan.
- 8) Memonitoring dan evaluasi kegiatan usaha yang dilakukan.

Dengan terbentuknya tata kerja Struktur Organisasi Tim Pokja program Agromerinepolitan perairan, pendamping kelompok, dan kelompok nelayan, maka rencana aksi agrosila di wilayah pesisir dapat dioperasikannya secara bertahap dan serentak. Kegiatan operasional dapat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Agromerinepolitan yang menjabarkan tahapan-tahapan pembangunan agrosila dalam mengelola hasil laut. Tahapan kegiatan operasional ini mempunyai hubungan yang terkait satu tahap dengan tahap yang lain dan keterkaitan dengan subsistem industri hulu dan industri hilir, seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini.



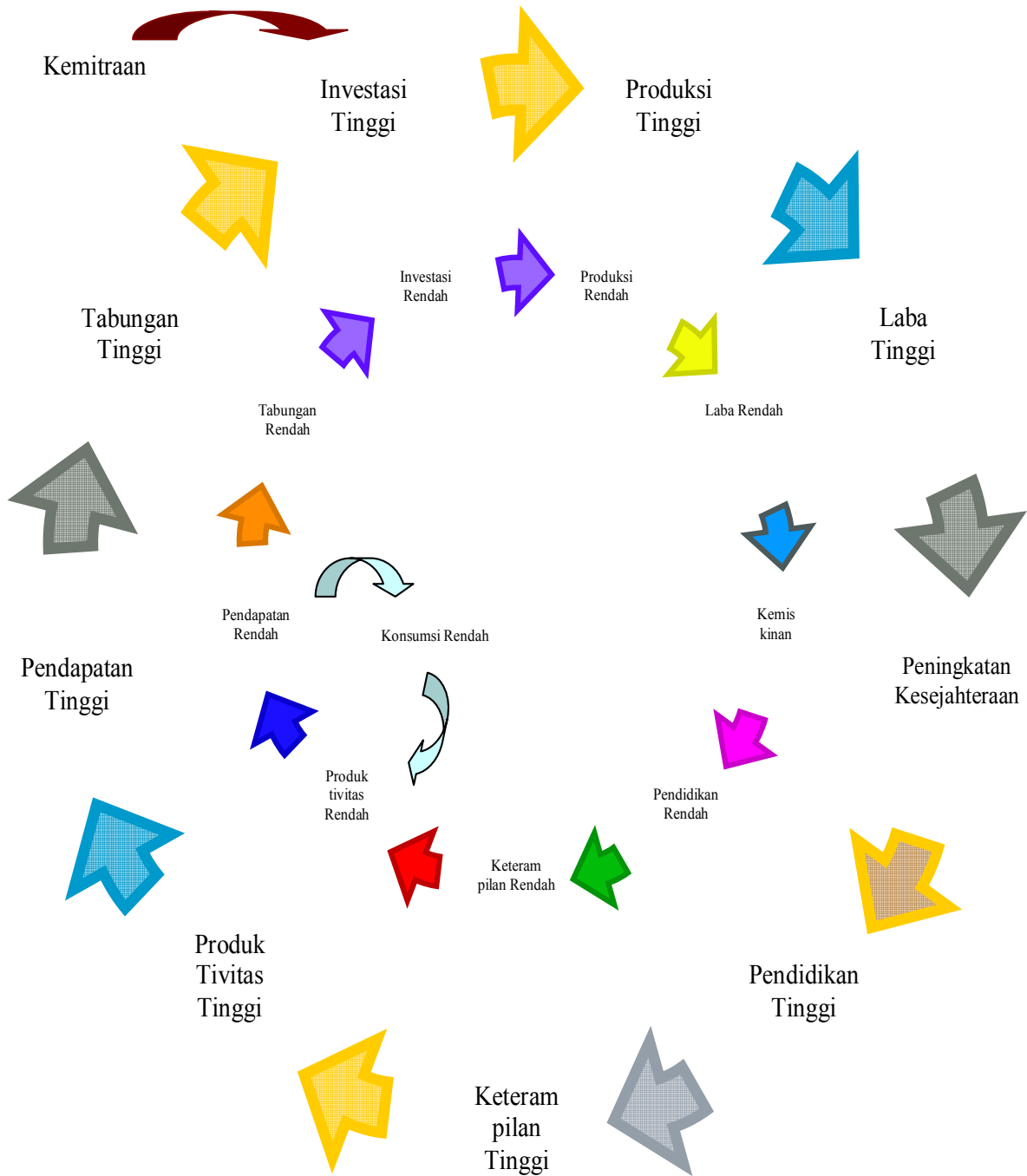
Gambar 6. Hubungan Nilai Tambah dengan Tahapan Kegiatan Agrosila

Berdasarkan tahapan kegiatan agrosila dari program agromerinepolitan Sumatera Utara diharapkan pendapatan nelayan pada tahun 2016 berada pada level US\$ 3,000 per tahun.

Tahapan kebijakan dimulai dari peningkatan produksi melalui pendidikan, keterampilan dengan memperhatikan kondisi lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal. Dari lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal, dapat dijelaskan penyebab kemiskinan akan menciptakan pendidikan rendah dan pendidikan rendah menyebabkan keterampilan rendah, dan lemah fisik yang mengakibatkan produktivitas rendah, dan pendapatan juga rendah. Pendapatan yang rendah membuat tabungan rendah dan investasi rendah. Investasi rendah menyebabkan profit rendah dan kembali pada kondisi kemiskinan. Kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 7.

Skenario pengentasan kemiskinan nelayan yang dimulai pembinaan kelompok dengan pendidikan latihan dan kemitraan akan membuka belunggu lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal. Peningkatan pendapatan nelayan akan menimbulkan permintaan konsumsi dan selanjutnya akan menimbulkan peluang investasi. Tingkat investasi terhadap industri hulu dan hilir akan menciptakan kesempatan kerja dan ekonomi wilayah.

Menggunting lingkaran kemiskinan tak berujung pangkal dengan kondisi usaha nelayan dan program agrosila dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan latihan pada kelompok nelayan dan kemitraan kelompok nelayan untuk memperoleh investasi dan modal kerja.



Gambar 7. Skema Lingkaran Setan Kemiskinan dan Penyelesaian

Sumber: Nikijuluw V. PH (2006)

Peningkatan keterampilan diperlukan melalui pendidikan dan latihan yang bersifat teknis usaha nelayan dengan manajemen untuk menjalankan usaha kelompok untuk mencapai profit yang optimal. Nelayan dengan modal sendiri tentu tidak ada opsi meminjam ke Bank atau lembaga Non Bank, biaya terkendala dengan syarat perbankan jaminan dan tidak layak usaha secara sistem perbankan. Kondisi ini perlu kebijakan pemerintah dalam

menjamin dan memperdaya modal usaha dengan sistem kredit yang murah atau melakukan kemitraan dengan usaha yang lebih besar melalui kemitraan diperoleh modal investasi, modal kerja dan jaminan pasar akan meningkatkan produktivitas usaha, dan pendapatan skenario ini dapat dilihat pada gambar lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal pada Gambar 7.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sumber daya pesisir dan laut yang terdiri dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya kelembagaan yang dikelola sedemikian rupa akan menjadi sumber energi yang kuat untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan ekonomi wilayah.
- 2) Model pengelolaan sumber daya pesisir dan laut akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengambil keputusan dalam menentukan Tim Pokja Agromerinepolitan, *Development Action Plan*, *Community Action Plan*, penentuan pendamping dan pembinaan kelompok Nelayan.
- 3) Political Will Agromerinepolitan pemerintah harus tegas dalam menangani kemiskinan masyarakat pantai (nelayan) melalui pendekatan partisipatif, holistik, dan berwawasan lingkungan yang akan dapat membangkitkan peranan kelompok nelayan menjadi mandiri.
- 4) Sumber daya pesisir dan laut dipandang bagi nelayan sebagai salah satu sumber jaminan sosial yang utama dan sebagai pemasok ikan diperkotaan yang memerlukan suatu sistem pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun oleh stockholder dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berlanjut.
- 5) Menggunting lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal dari masyarakat nelayan dimulai dari pendidikan keterampilan dan kemitraan untuk mendapat pembiayaan modal investasi dan modal kerja.
- 6) Sumber daya manusia pada program Agrosila, ada yang sebagai aktor utama dan ada sebagai aktor pendukung yang memiliki dimensi keunikan sebagai faktor produksi sumber daya manusia. Keunikan kerja seorang tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dengan pribadi sumberdaya manusia itu sendiri. Kegiatan agrosila pada subsistem hulu dan hilir menuntut kualitas sumber daya manusia baik sebagai pengendali faktor produksi maupun sebagai faktor produksi sumber daya manusia.

Hadirin yang saya hormati,

Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dan saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT.

Pada akhir pidato ini, izinkan saya ucapkan terima kasih disampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional atas kepercayaan dan penghormatan yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Prof. dr. Chairuddin P. Lubis SpA(K), DTM&H, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memfasilitasi pendidikan S3, memproses usulan saya untuk menjadi Guru Besar dan penyelenggaraan pengukuhan Guru Besar pada hari ini. Saya do'akan semoga Allah SWT tetap memberi rahmat kesehatan, hidayah kepada Bapak Rektor dalam memimpin Universitas Sumatera Utara yang kita cintai.

Kepada Kedua orang tua saya Bapak Ibrahim (Alm) dan Mak saya Imah Surbakti (Alm) yang telah merawat, mendidik dan selalu mendo'akan saya, sehingga menjadi salah seorang Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Do'a saya semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya. Amin.

Terima kasih saya ucapkan kepada para anggota Dewan Pertimbangan Fakultas Ekonomi, para anggota Senat Guru Besar Universitas Sumatera Utara, tim penilai kenaikan pangkat Universitas Sumatera Utara yang telah memberi persetujuan atas usulan saya sebagai Guru Besar.

Terima kasih saya sampaikan kepada Drs. Jhon Tafbu Ritonga, MSc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Wahyu Pratomo, SE, Mec selaku Ketua Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dan Pembantu Dekan serta Sekretaris Jurusan Studi Pembangunan yang telah bersedia mengusulkan kenaikan jabatan akademik saya ke jenjang Guru Besar.

Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Ir T. Chairun Nisa B., MSc selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE selaku Pembantu Direktur I Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Dr. M. Pandapotan Nasution, MPS selaku Pembantu Direktur II, dan Ketua dan Sekretaris Program Studi di

lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara atas dukungan dan kerja sama yang baik.

Khusus kepada Prof. Bachtiar Hassan Miraza yang amat terpelajar baik selaku Ketua Program Doktor (S3) Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, promotor, dan dosen saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, nasehat yang selama ini diberikan kepada saya.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat, saya sampaikan kepada guru saya dalam pendidikan formal mulai Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi, semoga amalnya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Kepada isteri saya Umi Kalsum, anak saya Rachmi Badriah, Rahma Vina dan Rahima Vani yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih atas kasih sayang, dukungan semangat dan do'a yang diberikan kepada saya.

Kepada mertua saya Bapak M. Supardi, Umi Hajar Hanum, keluarga Abang, Kakak, dan Ipar saya serta kemanakan atas perhatian dan kasih sayangnya, saya ucapkan terima kasih.

Terima kasih saya sampaikan kepada Drs. Bastari, MM dan Isteri, Dr. Sirozujilam, SE, Dra. Reina Linda Sari, MSi, Drs H.B. Tarmizi, SU, Drs, Arsad Lubis, MM, Dr. Abdul Kadir, SH, MSi, Dr Marlon Sihombing, Msi, Dr. Ir. Martius Bangun, MSi, Ir. Binsar Situmorang, MSi, Ir. Umar Hasibuan MM, Dr. Polin Pospos, Dr Rustam Effendi Nainggolan MM, Dr. Ramli Lubis MM, dosen-dosen Fakultas Ekonomi, dan kepada semua teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas dialog akademik yang selama ini dibina.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum saya akhiri pidato ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kehadirannya untuk mengikuti upacara ini. Mohon maaf apabila terdapat kesilapan dan tutur kata saya yang tidak pada tempatnya.

Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo. (2006). *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Budiharsono, S. (2005). *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Cetakan Kedua. Prody Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R., Rais, J. Ginting, S. P., dan Sitepu MJ. (2004). *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Cetakan Keempat. Padya Paramita. Jakarta.
- KADTBBSU. (2006). *Pedoman Penyusunan Detail Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara Tingkat Kabupaten*.
- Nikijuluw V. PH. (2006). *Politik Ekonomi Perikanan, Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan*. Cetakan Pertama. FERACO. Jakarta.
- Pranoto, A.K (2006). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Cetakan Pertama. Human Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
- Ramli, (2007). *Pemantauan Potensi Sumber Daya Pesisir dalam Meningkatkan Kinerja UKM Sektor Perikanan dan Kelautan Di Sumatera Utara; Makalah pada Seminar Meningkatkan Kinerja UKM Sektor Perikanan dan Kelautan di Sumatera Utara, Hotel Antares Hari Rabu Tanggal 4 Desember 2007*.
- Riksohadi Prodjo. S. (1988). *Ekonomi Lingkungan*. Cetakan Pertama Komunika. Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Keterangan Diri

Nama : Prof. Dr. Ramli, SE, MS
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa/02 Juni 1958
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi USU
NIP/Pangkat/Gol : 131762431/Penata TK.I/IVb
Jabatan : Guru Besar
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Nama Isteri : Umi Kalsum
Nama Anak : Rachmi Badriah,SE
Rahma Vina
Rahima Vani
Alamat : Jalan Merpati III No. 22 Perumnas Mandala
Medan Telp. (061) 7349454

B. Pendidikan

SD : Negeri 1 Langsa (1971)
SMP : Josua II Medan (1974)
SMA : YPK Medan (1978)
S1 : Sarjana Ekonomi USU (1986)
S2 : PWD USU (1993)
S3 : Ilmu Ekonomi UNAIR (2002)

C. Kursus Penataran

Nama Kursus	Lama Kursus	Penyelenggara
Aplika. Statistik	20-23 Maret 89	USU Medan
TI. Pendidikan	31 Jul-28 Sept 89	USU Medan
Anal. Kuantitatif/Managerial	7 Okt 89 – 9 Feb 91	UGM Yogyakarta
Agroindustri	28 Jan – 9 Feb 91	USU Medan
Metodologi	15 – 25 Juli 91	Lp USU Medan
Anal. Kuantitatif	16 Jan – 16 Feb 93	UNSYIAH B. Aceh
Gatara Sosial Ekonomi	06 – 09 April 95	PSL. UGM Yogyakarta
Audit Lingkungan	16 – 27 Oktober 95	PSL. UI Jakarta
TOT PKPI	16 – 24 Nopember 00	UGM Yogyakarta
Riset Akuntansi & Keuangan	20 – 21 Jan 2003	UGM Yogyakarta
Statistik Multi Variance	10 – 12 Mei 2005	UNAIR Surabaya
TOT Comoniti Development	20 – 26 Mei 2007	LAN Jakarta
TOT Good Governance	03 – 09 Sept 2007	PUSDIKLAT Medan

D. Riwayat Jabatan

- a. Dosen Fakultas Ekonomi USU sejak tahun 1988
- b. Dosen Program Pascasarjana USU sejak tahun 1999
- c. Staf Ahli Penelitian Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi USU sejak tahun 1991
- d. Sekretaris PUSLIT SDAL USU 1994–1997
- e. Tenaga Ahli BAPEDALDA SUMUT 1999
- f. Sekretaris Pusat Kajian dan Konsultasi Ekonomi Fakultas Ekonomi USU sejak tahun 1999
- g. Pengurus ISEI, Cabang Medan, Ketua Bidang Rencana dan Pengembangan Ekonomi Makro, sejak tahun 2004
- h. Sekretaris Program Doktor (S3) Perencanaan Wilayah SPs USU
- i. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara Sejak 2005
- j. Tim Pokja Agropolitan dan Agromarine Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2006

E. Penelitian

Penelitian		Keterangan	Waktu
1.	Dampak kebijaksanaan harga terhadap pendapatan petani padi sawah (studi kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)	Pelaksanaan Penelitian	06 Agustus 1991
2.	Analisa faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan nelayan perahu motor dan nelayan perahu layar di Desa Pantai Percut	Pelaksana Penelitian	05 Februari 1992
3.	Analisa perkembangan ekspor non migas dan sudut dolar dan laju inflasi	Pelaksana Penelitian	06 Juli 1992
4.	Partisipasi anggota P3A terhadap kelajuan sumber air irigasi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara	Pelaksana Penelitian	12 April 1994
5.	Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang memanfaatkan air Sungai Deli sebagai kebutuhan hidup di Kecamatan Maimon Medan	Pelaksana Peneliti	30 Desember 1994

6.	Evaluasi dampak sosial ekonomi proyek pertamina Pangkalan Susu, Sumatera Utara	Koordinator	Oktober 1995
7.	Studi UKL/ UPL proyek perkebunan PTP I di Aceh Barat dan Aceh Selatan	Pelaksana Aspek Sosial Ekonomi	November 1995
8.	Studi AMDAL proyek PLTU Ujian Batu Kecamatan Sarudik, Sibolga	Pelaksana Aspek Sosial Ekonomi	Mei 1996
9.	Studi audit lingkungan PT. AQUA, Berastagi	Pelaksana	Juni 1996
10.	Studi AMDAL proyek PLTU Si Jago-Jago Kecamatan Lumut, Sibolga	Pelaksana Aspek Sosial Ekonomi	Juli 1996
11.	Studi UKL. UPL Proyek pembangunan pipa gas PN. Gas Mabar, Tanjung Morawa	Pelaksana Aspek Sosial Ekonomi	26 Desember 1996
12.	Dampak resesi ekonomi terhadap sosial ekonomi	Pelaksana Peneliti	09 Agustus 1998
13.	Analisis terhadap faktor yang menghambat kemandirian usaha pengrajin sepatu di Kecamatan Medan Area	Anggota	29 Juli 1999
14.	Analisis pengaruh bantuan peningkatan jalan Kabupaten/ Kotamadya terhadap perekonomian Sumatera Utara	Pelaksana Peneliti	29 Juli 1999
15.	Samsat Kelautan Sumatera Utara	Pelaksana Penelitian	1998 s/d 1999
16.	Analisis sensitivitas penyesuaian PTKP terhadap perkembangan Pembangunan Kondisi Ekonomi	Pelaksana Peneliti	26 Desember 2003
17.	Dampak sosial ekonomi dan evaluasi belanja daerah dan proyek pembangunan	Pelaksana Peneliti Aspek Kesehatan	08 Nopember 2004
18.	Analisis permintaan dan penawaran sayur mayur serta produksi di Sumatera Utara.	Pelaksana Peneliti	Oktober 2004
19.	Aspek sosial AMDAL Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (LPPM USU 2005)	Pelaksana Peneliti	2005

20.	<i>Up Dating</i> Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) se-Sumatera Utara (Dispenda Prop. 2005)	Pelaksana Peneliti	2005
21.	Analisis peluang Dana Reksa di Provinsi Sumatera Utara (Litbang Prop. 2005)	Pelaksana Peneliti	2005
22.	Prospek dan peluang obligasi daerah dalam pembiayaan pembangunan bagi keberhasilan pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Litbang Prop. 2005)	Pelaksana Peneliti	2005

F. Karya Ilmiah

No	Tulisan Ilmiah	Publikasi	Edisi/Tahun
1.	Persiapan Pelaku Bisnis Menghadapi Pasar Bebas Era Globalisasi	Manajemen & bisnis Harapan Medan	Edisi 2 Tahun I Nopember 1996
2.	Partisipasi Nelayan dalam Mengelola Hutan Bakau Secara Ekonomis dan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara	Jurnal Ekonomi USU	No: 02/April 1997
3.	Metodologi Ekonomi Positif	Jurnal Ekonomi USU	No: 05/April 1998
4	Analisis Faktor Musim Trend dan Siklik terhadap Permintaan dan Penawaran Sayuran di Sumatera Utara	Artikel Jurnal Ekonomi USU	Tahun 2005
5.	Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonom	Artikel Jurnal Ekonomi USU	Tahun 2006
6.	Pengkajian Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Degradasi Hutan Bakau	(Buku), Penerbit Bangsa Press	Tahun 2006

G. Ceramah/Seminar

No.	Materi Ceramah	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Penyelenggara
1.	Ekonomi Lingkungan	19-08-1995	Kursus AMDAL	Medan	PUSLIT SDAL USU
2.	Audit Lingkungan	23-01-1996	Kursus AMDAL	Medan	PUSLIT SDAL USU
3.	Konsep pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Langkat Sumatera Utara yang berdimensi sosial ekonomi berwawasan lingkungan	22-24 Oktober 1996	Rakernas XIII PSL	Denpasar Bali	PPSDA & LH Universitas Udayana
4.	Dampak dan Pengelolaan pada sosial ekonomi	01-11-1996	Kursus Amdal	Medan	PUSLIT SDAL USU
5.	Dampak pembangunan terhadap sosial ekonomi berwawasan lingkungan	06-02-997	Ceramah	L.Pakam	Pemda TK.II Deli Serdang
6.	Pengolaan lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	30-07-97	Ceramah dalam rangka hari lingkungan hidup	Dairi	Pemda TK. II Dairi
7.	Analisis data dalam suatu penelitian	08-10 Sept 1998	Lokakarya Metode penelitian UMAHEADS proyek	Medan UMA	UMA
8.	Kerangka teori dalam penelitian	08 - 10 Sept 1998	Lokakarya Metode penelitian UMAHEAD S proyek	Medan	UMA
9.	Implementasi teknologi bersih (akrab lingkungan bagi kalangan industri manajemen, teknik)	10 - 12 Sept 1998	Lokakarya pengenalan teknologi bersih FT USU	FT-USU	FT-USU

10.	Analisis biaya terhadap penerapan teknologi bersih dan ISO 14000	14 – 16 Oktober 2000	Sosialisasi teknologi bersih	Medan	BAPEDALDA Sumatera Utara
11.	Analisis Sensitivitas penyesuaian PTKP terhadap perkembangan kondisi ekonomi	22 Des 2004	Hasil Penelitian	Jakarta	Departemen Keuangan Republik Indonesia
12.	Dampak sosial ekonomi dan evaluasi belanja daerah dan proyek pembangunan	22 Des 2004	Hasil Penelitian	Jakarta	Departemen Keuangan Republik Indonesia
13	Dasar-Dasar Ekonometrikal	12 Mei 2003	Lokakarya Sesumbag ut Staf Bank Indonesia	Brastagi	Bank Indonesia Cabang Medan
14.	Kajian insentif ekonomi perkebunan melalui penerepan NJOP di Sumatera Utara	Tahun 2007	Pemakalah	Medan	F.Pertanian USU
15.	Pembangunan masyarakat dan wilayah pesisir Sumatera Utara	1 Sept 2007	Pemakalah	Medan	Program Doktor Perencanaan Wilayah SPs USU
16.	Seminar peranan obligasi daerah dalam pembudayaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara.	Tahun 2006	Pemakalah	Medan	Balit Bang Provinsi
17	Pembangunan masyarakat pesisir Wilayah Sumatera Utara	Desember Tahun 2007	Pemakalah	Medan	Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara
18	Partisipasi responsif dan non partisan dalam penyelenggaraan <i>good gavernance</i>	18 Des. Tahun 2007	Pemakalah	Medan	Diklat Provinsi Sumatera Utara

19	Pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dalam meningkatkan kinerja UKM sektor perikanan dan kelautan di Sumatera Utara	10 Januari Tahun 2008	Pemakalah	Medan	Dinas Perikanan Provinsi Sumatera utara
20	Pengaruh aparaturn pemerintah terhadap pembangunan ekonomi	13 Maret Tahun 2008	Pemakalah	Medan	Diklat Provinsi Sumatera Utara

H. Penghargaan Tanda Jasa

Dari Presiden Republik Indonesia Piagam Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, tahun 2001.



Prof. Dr. Ramli, SE, MS, lahir di Kota Langsa tanggal 2 Juni 1958, setelah menyelesaikan pendidikan SD di Langsa, melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Medan. Pada tahun 1986 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi. Pada tahun 1993 memperoleh gelar Magister Sains PWD dari USU dan tahun 2002 memperoleh gelar Doktor Ilmu Ekonomi di UNAIR.

Pengalaman Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada bidang pendidikan, selain mengikuti pendidikan tambahan seperti TOT, Bidang SCBD, Manajemen Mutu, dan Good Governance serta Analisis Data dengan program (LISKEL AMOS) untuk meningkatkan kualitas dalam pengajaran S1, S2, dan S3 di lingkungan USU maupun perguruan tinggi lainnya. Bidang penelitian, aktif melakukan riset *problem solving* dan pengembangan ilmu dengan cara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta. Bidang pengabdian, telah melakukan pengabdian secara mandiri sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan melakukan pembinaan “Kelompok Nelayan Sepakat Maju” Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Aktif membantu pemerintah sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara dan Anggota Pokja Agropolitan dan Agromerinepolitan Provinsi Sumatera Utara.